

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AK, Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cetakan ke-2. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Cetakan ke-4. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Boediarto, Ali, et. al. *Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*. Cetakan Ke-2. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2014).
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Cetakan ke-2. (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan Ke-1. (Jakarta: Prenada Media, 2016).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan ke-15. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2*. (Jakarta: Ind. Hill Co, 2002).
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- HS, Salim. *Hukum Kontrak, Teori & Praktik Penyusunan Kontrak*. Cetakan ke-14. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- _____. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Cetakan ke-10. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Kansil, C.S.T. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995).
- Komandoko, Gamal dan Handri Rahardjo. *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013).
- Marbun, B. N. *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*. Cetakan Ke-1. (Jakarta: Puspa Swara, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan Ke-14. (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Cetakan ke-6. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Cetakan ke-3. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum*. (Bandung: Remadja Zarya, 1988).
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Cetakan ke-6. (Bandung: Putra A Bardin, 1999).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Cetakan Ke-1. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-11. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke-21. (Jakarta: Intermasa, 2005).
- _____. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-31. (Jakarta: Intermasa, 2003).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Edisi Revisi. Cetakan ke-2. (Jakarta: Djambatan, 1997).
- _____. *Perjanjian Utang Piutang*. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media, 2013).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek).

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52).*

_____. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).*

_____. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).*

C. Putusan Pengadilan

Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1576 K/Pdt/2017.*

_____. *Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 43/Pdt.G/2016/PN LSM.*

_____. *Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pdt.G/2016/PN TTE.*

_____. *Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 85/PDT/2017/PN BNA.*

_____. *Putusan Pengadilan Tinggi Ternate Nomor 23/PDT/2017/PT TTE.*

D. Makalah Ilmiah

Bahri, Syaeful dan Jawade Hafidz. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda pada Testament yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Perspektif Keadilan". *Jurnal Akta*. Volume 4 No. 2 Tahun 2017.

Dalimunthe, Dermina. "Akibat hukum wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)". *Jurnal Al-Maqasid*. Volume 3 No. 1 Tahun 2017.

Indriyani, Atik. "Aspek Hukum Personal Guaranty". *Jurnal Hukum Prioris*. Volume 1 No. 1 Tahun 2006.

Junarold, Gary. "Akta Otentik (*Authentieke Akte*) sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992)". *Skripsi*. (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

Lukman, Marcus. "Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum tertulis Nasional". *Disertasi*. (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996).

Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". *Negara Hukum*. Volume 7 No. 1 Tahun 2016.

Sasta, Ezra De Artah dan Ning Adiasih. "Penerapan Asas Cepat dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang (Contoh

Kasus: Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng)”. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 1 No. 1 Tahun 2018.

Shohib, Muhammad. “Sikap Terhadap Uang dan Perilaku Berutang”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. Volume 03 No. 01 Tahun 2015.

Y. Yangin, Feronika. “Analisis Hukum Pengalihan Piutang (*Cessie*) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata”. *Lex Privatum*. Volume IV No. 5 Tahun 2016.

E. Wawancara

Pandamdari, Endang. *Wawancara dengan Penulis*. Dosen. 4 Juni 2020. Jakarta.

Wahyono. *Wawancara dengan Penulis*. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin. 11 Juni 2020. Pengadilan Tinggi Banjarmasin.